

**EDISI 20
APRIL
2026**

TIM KONTEN MPP PKS



Salam Redaksi

Assalamu'alaikum..

Edisi 20 ini mengajak pembaca untuk meninjau ulang makna keanggotaan dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana ditulis oleh **Syamsu Hilal, Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi MPP PKS**.

Dalam tulisannya, keanggotaan tidak direduksi menjadi sekadar status administratif, melainkan dimaknai sebagai jalan perjuangan yang utuh—melibatkan pembinaan ruhiyah, pembentukan karakter, hingga penyiapan kepemimpinan yang berkelanjutan. Perspektif ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap praktik politik yang sering terjebak pada formalitas tanpa substansi.

Lebih jauh, tulisan ini menegaskan bahwa sistem keanggotaan yang terstruktur dan berjenjang bukan hanya instrumen organisasi, tetapi fondasi bagi lahirnya kepeloporan bangsa. Dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan nilai, moralitas, dan kapasitas kepemimpinan, PKS berupaya menjaga agar politik tetap berada di jalur pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Di sinilah keanggotaan menemukan maknanya yang paling dalam: sebagai amanah yang menuntut integritas, kesinambungan, dan kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

Selamat Membaca...



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsepsi Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



KEANGGOTAAN YANG SISTEMIK (Dari Komitmen Nilai Menuju Kepeloporan Bangsa)

Syamsu Hilal
**Ketua Komisi Konstitusi dan
Legislasi MPP PKS**

Pendahuluan

Dalam banyak organisasi politik, keanggotaan sering kali dipahami sebatas formalitas administratif: memiliki kartu anggota, tercatat dalam sistem, dan hadir dalam kegiatan partai. Namun bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), keanggotaan bukanlah sekadar status, melainkan jalan perjuangan. Ia adalah proses pembinaan ruhiyah, pembentukan karakter, dan penyiapan kepemimpinan yang berkelanjutan.

PKS berdiri di atas asas Islam dan berkomitmen melahirkan kader yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Karena itu, keanggotaan tidak boleh dibiarkan tumbuh secara sporadis. Ia harus dibangun secara sistemik: terstruktur, berjenjang, terarah, dan terjaga.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2025 ditegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai peraturan perundang-undangan. Namun lebih dari itu, PKS menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota.

Di sinilah keunikan PKS: keanggotaan adalah sistem pembinaan, bukan sekadar pendaftaran.

Rekrutmen sebagai Awal

Keanggotaan dimulai dari keterbukaan. PKS membuka pintu bagi setiap warga negara yang ingin berjuang dalam koridor konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Namun setelah seseorang menyatakan kesediaannya bergabung, perjalanan sesungguhnya baru dimulai.

Rekrutmen dalam PKS bukan sekadar mengisi formulir, tetapi memasuki proses iltizam—komitmen sadar untuk berjuang dalam barisan yang tertib dan bernilai. Kaderisasi dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembinaan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kesadaran ideologis, kedewasaan spiritual, dan tanggung jawab kebangsaan.

Di dalam proses inilah nilai-nilai Islam, semangat kepeloporan, dan tanggung jawab konstitusional dipadukan. Seorang anggota tidak hanya diajak menjadi aktivis politik, tetapi menjadi insan yang memaknai politik sebagai ibadah dan pelayanan.

Jenjang Keanggotaan: Jalan Tumbuh yang Terarah

Salah satu ciri sistemik keanggotaan PKS adalah pembagian jenjang anggota dalam tiga kelompok besar :

1. Kelompok Anggota Pendukung

- Anggota Pemula
- Anggota Siaga

Tahap ini adalah masa penanaman nilai. Di sini kader belajar memahami visi perjuangan, disiplin organisasi, serta membangun fondasi komitmen.



2. Kelompok Anggota Penggerak

- Anggota Muda
- Anggota Pratama

Pada fase ini, kader mulai memikul tanggung jawab penggerakan. Ia bukan lagi sekadar peserta pembinaan, tetapi pelaku perubahan di lingkungannya.

3. Kelompok Anggota Pelopor

- Anggota Madya
- Anggota Dewasa
- Anggota Utama

Inilah fase kepeloporan. Kader yang telah matang secara ideologis dan organisatoris diproyeksikan menjadi pembina, pengarah, dan pemimpin. Jenjang ini bukan sekadar klasifikasi administratif. Ia adalah jalan pertumbuhan ruhiyah dan intelektual. Kenaikan tingkat bukan semata soal waktu, tetapi soal kualitas komitmen dan kontribusi.

Dengan sistem ini, PKS memastikan bahwa kepemimpinan lahir dari proses tarbiyah dan pembinaan, bukan dari popularitas atau kekuatan finansial.



Di sinilah keanggotaan PKS menemukan maknanya: bukan sekadar menjadi bagian dari partai, tetapi menjadi bagian dari perjuangan yang tertib, bernilai, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta kejayaan bangsa.

Keanggotaan dan Integritas Moral

Sistem yang kuat bukan hanya membangun, tetapi juga menjaga. AD/ART PKS mengatur dengan jelas sebab-sebab pemberhentian keanggotaan . Keanggotaan dapat berakhir jika seseorang:

- Mengundurkan diri
- Menjadi anggota partai lain
- Melanggar aturan
- Melakukan tindakan tercela atau bertentangan dengan hukum

Hal ini menunjukkan bahwa PKS tidak memisahkan politik dari moralitas. Politik tanpa integritas hanya akan melahirkan krisis kepercayaan. Karena itu, pengawasan etik dan kesyariahan menjadi bagian integral dari sistem keanggotaan.

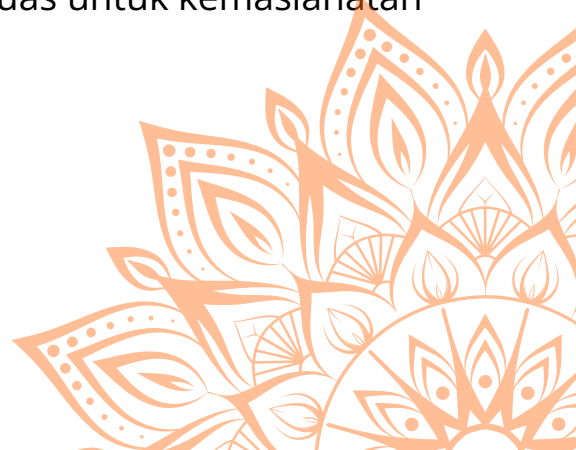
Dalam perspektif ruhiyah, ini adalah penjagaan amanah. Keanggotaan bukan hak tanpa batas, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga kehormatannya.

Anggota Istimewa: Sinergi Kepakaran dan Ketokohan

PKS juga membuka ruang bagi Anggota Istimewa, yakni tokoh yang berjasa, pakar yang memiliki kompetensi tertentu, atau individu yang secara khusus mengajukan diri untuk berkontribusi .

Ini menunjukkan bahwa sistem keanggotaan PKS tidak eksklusif, tetapi adaptif dan kolaboratif. Kepeloporan membutuhkan sinergi antara kader ideologis dan tokoh strategis.

Dengan demikian, sistem tetap kokoh, tetapi tetap terbuka terhadap kontribusi luas untuk kemaslahatan bangsa.



Keanggotaan Sistemik dan Kepemimpinan Nasional

Visi PKS adalah menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan visi ini, partai membutuhkan sistem kaderisasi yang kokoh.

Keanggotaan yang sistemik melahirkan tiga kekuatan utama:

1. Kesenambungan Regenerasi

Tidak ada kekosongan kepemimpinan karena kader disiapkan secara berjenjang.

2. Integritas Terjaga

Etika dan disiplin menjadi pagar moral perjuangan.

3. Kematangan Politik

Kader memahami politik sebagai jalan pelayanan, bukan perebutan kuasa.

Dalam konteks demokrasi modern yang sering diramaikan pragmatisme jangka pendek, sistem kaderisasi seperti ini menjadi oase. Ia menjaga partai tetap berada di jalur nilai dan konstitusi.

Penutup: Sistem sebagai Amanah

Keanggotaan yang sistemik adalah jantung organisasi. Tanpa sistem, partai mudah terombang-ambing oleh kepentingan sesaat. Dengan sistem, perjuangan memiliki arah, kesinambungan, dan kedalaman makna.

PKS melalui AD/ART 2025 menegaskan bahwa keanggotaan adalah proses pembinaan nilai, peneguhan komitmen, dan penyiapan kepemimpinan. Ia adalah perjalanan ruhiyah sekaligus perjalanan kebangsaan.

Di sinilah keanggotaan PKS menemukan maknanya:

bukan sekadar menjadi bagian dari partai, tetapi menjadi bagian dari perjuangan yang tertib, bernilai, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta kejayaan bangsa.#





BERITA MPP



KOKOHKAN GOOD PARTY GOVERNANCE:

MPP PKS SOSIALISASIKAN PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI TINGKAT PUSAT

JAKARTA – Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar agenda strategis berupa Sosialisasi Pedoman Partai tentang Tata Kerja Organisasi Struktur Partai di Tingkat Pusat. Bertempat di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (27/4), kegiatan ini menjadi momentum penguatan manajerial partai di level tertinggi.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh 90 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan dan pengurus MPP, Dewan Pengurus Pusat (DPP), serta Dewan Syariah Pusat (DSP). Kehadiran para pengambil kebijakan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi langkah dalam menjalankan roda organisasi.

Sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PKS Tahun 2025 Pasal 26 Ayat (2) huruf b, MPP PKS memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyosialisasikan Pedoman Partai guna memastikan setiap gerak organisasi tetap berada di koridor yang telah ditetapkan.

Ketua Komisi SDM, Organisasi, dan Kewilayahan MPP PKS, Dr. Hermanto sebagai narasumber, memaparkan materi bertajuk "Mengokohkan Soliditas Struktur melalui Implementasi Tata Kelola Partai yang Baik". Dalam uraiannya, beliau menekankan bahwa struktur yang kuat bermula dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pimpinan mengenai krusialnya Good Party Governance (GPG). MPP PKS memandang bahwa tata kelola partai yang baik adalah fundamental utama dalam berorganisasi untuk menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis. #